

## **BAB 4**

### **STRATEGI POLITIK PKS DI KABUPATEN KEBUMEN**

Bab empat ini merupakan analisis mengenai strategi pengembangan PKS di Kebumen, yang meliputi budaya politik PKS antara cita dan fakta, peran PKS dalam membangun kultur politik, orientasi ideologis, kekuatan dan kelemahan PKS.

#### **4.1. Strategi Pengembangan PKS**

Penentuan antara strategi *ofensif* (menyerang) atau strategi *defensif* (bertahan) yang harus dipakai oleh setiap partai berbeda-beda, menyesuaikan dengan situasi dan posisi partai. Kehadiran PKS di Kebumen berdasarkan teori strategi politik Peter Schorder maka strategi yang digunakan adalah strategi *ofensif* (menyerang). Dalam hal ini terlihat dari kehadiran PKS sebagai partai baru yang tentunya harus mampu menunjukkan diri dan siap bersaing dengan partai-partai lama terutama bagi partai-partai Islam yang telah berdiri sebelumnya. Peneliti di sini melihat bahwa strategi *ofensif* (menyerang) yang dilakukan oleh PKS yang sebelumnya PK berbeda dibandingkan dengan partai politik Islam pendahulunya.

Kelahiran PK yang kemudian menjadi PKS merupakan lahirnya sebuah partai yang unik karena berbeda dengan partai-partai sebelumnya. PKS lahir dari gerakan dakwah para mahasiswa di kampus-kampus luar negeri maupun tanah air. Perjalanan dakwah para aktivis kampus dikenal sebutan gerakan tarbiyah di Indonesia, mulai marak sejak tahun 1990-an. (Edward., 2006: xiii.)

Berbeda dengan partai Islam lain seperti PKB yang merupakan perjuangan dari organisasi NU, ataupun PAN yang tokoh pendirinya mempunyai *basic* dalam perjuangan di Muhammadiyah. Keunikan dari strategi *ofensif* (menyerang) yang digunakan PKS ini terletak pada fungsi kegiatan tarbiyah itu sendiri. Kegiatan tarbiyah yang pada awalnya merupakan cikal

bakal dari pendirian partai yang kemudian tarbiyah juga digunakan dalam sistem pengkaderan di PKS. Dan, menjadi ujung tombak dalam menciptakan kader-kader PKS yang militan.

Berbicara mengenai *basic* pendirian partai tentunya akan menuju strategi *targetting*. *Targetting* adalah memfokuskan pada suatu segmen tertentu yang akan diraih. Dengan kata lain *Targetting* merupakan keputusan untuk membidik konstituen tertentu yang sekiranya mudah diperoleh. (Rudianto, 2003: 21).

Setiap partai politik seharusnya mempunyai target konstituen tertentu yang harus digarap untuk dijadikan pendukung utamanya. Misal saja PKB dengan *captive market*-nya dari *nahdhiyin*. PAN didukung anggota Muhammadiyah, dan PDI-P didukung oleh kum nasionalis-abangan, sedangkan PKS dengan *captive market*-nya dari golongan terpelajar, karena cikal bakal pendiriannya berada di lingkungan kampus.

Pada perkembangannya PKS yang *captive market*-nya dari kalangan terpelajar kemudian berani mencoba untuk memperluas segmentasinya. Tidak hanya kalangan terpelajar, namun kalangan *Nahdliyin* dan *Abangan* yang merupakan kelompok terbesar di Kebumen juga menjadi sasaran dari strategi politik yang diterapkan oleh PKS. Melalui penyatuan para kader PKS dengan masyarakat Kebumen yang dilakukan di pusat-pusat kegiatan keagamaan mempermudah PKS diterima di Kebumen.

Strategi pemenangan yang diterapkan oleh PKS di Kebumen untuk mengenal lebih jauh segmen konstituen (pemilih) dalam membuka peluang, merumuskan pesan-pesan komunikasi politik, mendesain program, dan pelayanan prima. (Nursal, 2004:110). Dalam hal ini PKS mempunyai strategi unik melalui kegiatan dakwah yang dilakukan dan menyatu dengan masyarakat melalui kader-kader militan di masjid, musholla, dan tempat-tempat yang menjadi pusat kegiatan keagamaan.

Jama'ah Tarbiyah yang merupakan awal dari pergerakan PKS kemudian menjadi salah satu sistem pengkaderan, pada akhirnya juga menjadi sebuah “senjata” andalan PKS dalam segmentasi. Melalui modal tarbiyah yang sudah menjadi sebuah hal “unik” inilah yang menjadi landasan para kader PKS dalam menarik simpatisan pada masjid, musholla, dan tempat-tempat yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Layaknya kegiatan dakwah yang sudah “mendarah-daging” ini yang menjadikan PKS siap dan sanggup membawa jargon Islam dalam politiknya.

Melalui tempat yang menjadi pusat-pusat kegiatan keagamaan tersebutlah, PKS di Kebumen membawa atribut partai berazaskan Islam, sebagai strategi pengembangan dalam memosisikan komunikasi politik untuk memunculkan citra tertentu kepada satu atau beberapa kelompok konstituen (pemilih). Penentuan posisi ini untuk menempatkan eksistensi partai politik yang berbeda dengan partai politik lainnya, atau dengan kata lain bagaimana memosisikan kedudukan partai politik agar bisa diterima, enak didengar, serta dapat dipercaya dalam suatu komunitas masyarakat yang akan dijadikan target.(Nursal,2004:155).

Atribut PKS sebagai partai berazaskan Islam nampaknya cukup meraih simpati masyarakat Kebumen, terutama dari kalangan *nahdliyin* dan *abangan* yang cukup merindukan sebuah partai berazaskan Islam yang benar-benar sesuai dengan jargonnya tersebut. Bahkan pemasangan bendera PKS dilakukan dengan cara yang cukup unik yaitu sejumlah bendera PKS dipasang di pusat-pusat kota/kecamatan secara bergilir atau bergantian. Misalnya di kecamatan Gombong sejumlah bendera dipasang selama satu minggu, kemudian dipindah ke kecamatan lain begitu seterusnya sehingga seluruh kecamatan terjangkau sosialisasi politik PKS.

Hal lain juga dapat dilihat dari sumbangan-sumbangan infrastruktur yang diberikan PKS pada masjid, musholla, ataupun

tempat-tempat yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat Kebumen. Karena hal tersebutlah yang dapat meyakinkan masyarakat Kebumen bahwa PKS tidak hanya membawa atribut Islam, namun juga terdapat bukti dan kepedulian terhadap tempat peribadatan orang Islam

#### **4.2. Budaya Politik PKS antara Cita dan Fakta**

Budaya politik PKS dalam rumusan visi dan misinya mempunyai nilai yang positif untuk pemberdayaan kader pada khususnya dan masyarakat secara umum. Di satu sisi kultur politik PKS mempunyai harapan-harapan yang dapat dijadikan sebagai sebuah cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Namun di sisi lain dapat dikatakan bahwa hal tersebut berubah seiring dengan perkembangan sistem politik sekaligus dinamika masyarakat. Pendek kata perubahan adalah harapan.

Budaya politik PKS dapat dilihat dari berbagai macam bentuknya. Bentuk budaya politik PKS dalam perjalanan politiknya dapat dilihat dari dua kacamata pandang, yaitu secara internal dan eksternal. Dalam kacamata internal budaya politik PKS dapat diselami melalui pendekatan politik yang dilakukan untuk para kader dan simpatisannya, sementara secara eksternal dalam kebijakan partai yang terkait dengan persoalan-persoalan yang berkembang dan menjadi pembicaraan umum masyarakat.

Budaya politik internal PKS terwujud dalam bentuk sebagai berikut; adanya pendidikan kader secara terstruktur, munculnya ketetapan mekanisme pencalonan kepala daerah yang memuat berbagai kriteria, adanya budaya tertib dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam aksi politiknya, menuangkan nilai keadilan, kesejahteraan dalam setiap kebijakan yang dilakukan, dan *Ta'awwun* (saling menolong).

Sementara itu dalam kacamata *eksternal* budaya politik PKS dilihat dalam kiprah yang dilakukan terkait dengan menghadapi persoalan politik dan kemasyarakatan yang sedang berkembang. Kultur politik yang ditonjolkan dalam hal ini adalah

PKS berusaha mengusung nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran Islam sebagai ruh gerakannya. Beberapa budaya politik ini antara lain; adanya komitmen PKS untuk menjadi "oposisi" terhadap kebijakan pemerintahan sekaligus sebagai penyeimbang kebijakan, munculnya budaya tertib dalam penyaluran aspirasi dan sebagainya.

Namun sebagai sebuah konklusi dari budaya politik PKS tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan budaya politik PKS merupakan ciri yang tidak dapat dihilangkan dari jati dirinya sebagai partai politik yang bertindak berdasarkan pada agama Islam. Sebagai partai yang demikian maka PKS tampil dalam performa yang Islami dengan mengusung moral dan *attitude* yang sifatnya positif, walaupun terkadang manuvernya menjadi tanda tanya bagi masyarakat menyangkut perubahan-perubahan kultur yang dilakukannya.

#### **4.3. Peran PKS Dalam Membangun Kultur Politik**

Pada sub bab ini, penulis menganalisis mengenai peran PKS Kebumen secara institusional dalam membangun budaya politik bagi masyarakat. Menurut beberapa sumber yang penulis peroleh, PKS mengejawantahkan pembangunan budaya politik dan sosialisasi (pendidikan) politik dalam beberapa point berikut ini:

##### **4.3.1. Pola Kaderisasi**

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader. Demikian apa yang dicita-citakan oleh PKS. Partai kader yang dimaksudkan di sini adalah partai yang didukung oleh kader militan yang telah melalui serangkaian proses kaderisasi. Pada tahun 2005 PKS menamakan dirinya tidak hanya partai kader saja tetapi partai kader yang didukung *massa*. (DPW PKS Jateng dan Humas DPD PKS Kebumen, 2006

Secara organisasi PKS ada dua jenis kader. *Pertama*, kader pendukung, yaitu kader cair yang belum militan kepada PKS dan belum mengikuti proses kaderisasi PKS. *Kedua*, kader terbina. Kader terbina adalah kader yang sudah mengikuti kegiatan kaderisasi rutin yang disebut *Ta'lim Rutin Partai* (TPR).

Tindakan kolektif PKS terhadap dua jenis kader itu adalah pembinaan dan kaderisasi intensif untuk kader terbina. Pola kaderisasi partai yang terstruktur dan dilakukan secara berjenjang secara rapi adalah; Kader Pemula, Kader Muda, Kader Madya, Kader Dewasa, Kader Ahli, Kader Purna. Jenjang kaderisasi tersebut bermuara pada penguasaan kader akan ideologi, epistemology, dan skill politik. Ideologisasi ini menjadi sesuatu yang fundamental bagi PKS karena akan menjadi ruh gerakan PKS dalam melakukan kerja-kerja politik serta arah perjuangan.

Salah satu contoh kaderisasi yang dilakukan oleh PKS adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengurus DPW PKS Jateng bidang pembinaan kader yakni melakukan *jaulah* secara menyeluruh ke struktur tarbiyah atau pendidikan di seluruh Jawa Tengah. *Jaulah* dibagi di 6 keresidenan yakni Pekalongan, Banyumas, Surakarta, Kedu, Pati, dan Semarang. *Jaulah* dilaksanakan setiap Sabtu dan Ahad pada bulan Juni dan Juli 2006. Agenda *jaulah* yang digunakan sebagai ajang konsolidasi pembinaan kader ini melibatkan seluruh staf bidang pembinaan kader DPW PKS serta seluruh staf bidang pembinaan kader DPD PKS. Dalam kegiatan ini, juga dibagikan kuesioner tentang kegiatan-kegiatan dan Struktur DPW PKS, juga dilakukan proses rekapitulasi data kader berbagai jenjang serta agenda/program kaderisasi.

Ada juga kegiatan serupa, seperti kegiatan perkemahan yang disebut dengan *Mukhoyyam* Pandu Keadilan Dasar I yang dilakukan DPD PKS Kota Semarang pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Agenda ini dikhususkan bagi kader pemula PKS dengan

jumlah peserta 130 orang di Nglimut Gonoharjo Kendal. *Mukhoyyam* ini adalah sarana awal untuk membentuk jiwa dan karakter kader dakwah. Acara ini terdiri dari senam, *fun game*, *long march* dan *haflah*/pentas seni. Pentas seni ini menjadi program unggulan. Di sini setiap regu diuji kreatifitasnya. Beberapa tema pokok ditawarkan antara lain tragedi Palestina & Libanon dan sejarah perjuangan gerakan Tarbiyah di Indonesia.(Pengkaderan DPW PKS Jateng & DPD PKS Kebumen , 2006)

Pengkaderan yang terdapat di PKS dengan jenjangnya memberikan ilustrasi bahwa dalam tubuh PKS terdapat pola pendidikan terstruktur. Maksud dari adanya hal tersebut lebih pada proses untuk meningkatkan kompetensi anggota terhadap persoalan politik, disamping pada institusionalnya. Pengkaderan ini memberikan kontribusi yang positif dalam pendistribusian kader ke depan, disamping sebagai ajang pemberdayaan diri masing-masing anggota.

#### **4.3.2. Pelayanan terhadap Konstituen dan Masyarakat**

Untuk kader pendukung bentuk perhatiannya adalah pelayanan. Pelayanan ini dilakukan secara intensif baik oleh PKS secara kelembagaan maupun oleh anggota legislatif yang ada di parlemen serta seluruh kekuatan partai. Bentuk pelayanannya adalah: Edukasi, Advokasi, Mediasi, Dakwah, dan Fasilitasi.

Bentuk pelayanan tersebut secara institusi adalah dengan dibentuknya P2B (Pelaksana Penanggulangan Bencana) PKS. P2B secara total terjun sebagai relawan dalam penanggulangan bencana alam di Klaten dan Yogyakarta. Dalam penanggulangan bencana ini, PKS menggariskan kebijakan melalui tiga tahap;

*Pertama, rescue* (tanggap darurat). Dalam tahap ini PKS Jateng memberangkatkan 500 personel. Terdiri atas 75 dokter, 140 paramedis, 540 pengajar, 200 da'i empat psikolog dan sisanya tim SAR. Untuk bantuan yang berupa barang PKS Jateng

sudah mengirim dua truk beras, 1.500 dus mie instant, 600 tenda kecil, 50 tenda pleton, 1.500 selimut serta kebutuhan mandi, pembalut wanita, minyak goreng dan lata tulis bagi para siswa. Dana bantuan yang sudah disalurkan kepada masyarakat mencapai 1,4 milyar. Untuk memudahkan kerja di lapangan maka PKS mendirikan 27 posko dilokasi gempa. *Kedua, recovery* (pemulihan). Tahap ini lebih berat dari tanggap darurat, karena para korban tidak hanya butuh logistic tapi juga membutuhkan pemulihan mental, sosial, layanan pendidikan, kesehatan, dan juga tempat berteduh yang layak. Pada tahap ini PKS mendirikan pos medis di depan kecamatan Wedi, Klaten, sekolah-sekolah darurat di tiga kecamatan yaitu Gantiwamo, Wedi dan Prambanan. Sekolah darurat yang dibangun mencapai 17 sekolah. trauma center dan layanan konseling juga dikonsentrasikan di empat kecamatan yaitu; Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Pasung serta Prambanan. *Ketiga, rehabilitasi*. Pada tahapan ini adalah masa pembangunan kembali sistem sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Hal inilah yang belum terselesaikan karena membutuhkan waktu, sumberdaya dan energi yang tidak sedikit. (Majalah Salam, Edisi 2, September 2006)

Sementara bentuk advokasi dan mediasi adalah peran PKS dalam mendampingi korban Sutet, masalah air, advokasi distribusi pupuk, advokasi industri kecil dan menengah yang rusak akibat bencana, penganggaran untuk bidang pertanian, advokasi penambangan galian di Jawa Tengah yang tidak terkendali seperti Boyolali, Klaten, dan Kabupaten Magelang, membantu korban gempa Klaten dan banjir Jepara, advokasi degradasi lingkungan, advokasi ujian nasional, penanganan kekeringan, advokasi dana kesehatan pasca bencana, advokasi perbaikan gedung sekolah yang rusak, advokasi tiga agenda besar pendidikan, yakni buta aksara, wajib belajar 9 tahun, dan rehabilitasi gedung rusak, advokasi terhadap pertumbuhan pendidikan keagamaan.

Adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan PKS dengan berbagai bentuknya membersihkan makna bahwa PKS berusaha sadar lingkungan. Kontribusi yang diberikan dalam persoalan yang dihadapi masyarakat jelas akan berimplikasi positif terhadap pembangunan citra yang secara otomatis berimbas kepada pembangunan budaya politik. Hal ini menjadi menarik jika PKS mampu mempertahankan budaya seperti ini sebagai ajang untuk mendapatkan respon yang lebih baik.

Peningkatan-peningkatan penanganan korban bencana dan sebagainya merupakan tuntutan perkembangan yang senantiasa dinantikan. Budaya politik yang dikembangkan PKS dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencerminkan diri PKS bahwa keberadaannya merupakan penjelmaan dari rakyat, sehingga ketika sebagian masyarakat merasa “sakit” otomatis dirinya menjadi “sakit” pula.

#### **4.3.3. Rekrutmen Politik (Pilkada, Pemilihan Anggota Legislatif)**

Dalam tradisi politik PKS, setiap momentum politik seperti Pilkada terdapat mekanisme yang mengatur. Partisipasi politik PKS jelas terlihat dengan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan gawe politik tersebut. Seiring dengan adanya hal tersebut PKS membentuk tim kualifikasi yang bertugas menyaring siapa yang akan dicalonkan dalam Pilkada. Sebagaimana di atas telah disebutkan bahwa calon kepala daerah diseleksi melalui lembaga Majelis Syura.

Ketika calon yang akan diusung berasal dari kader partai, maka mekanismenya adalah semua kader terbina yang jumlahnya di Jawa Tengah lebih dari seratus ribu harus memberikan pertimbangan dengan diadakannya polling, semacam pemilu internal. Hasil polling itulah yang dijadikan dasar bagi PKS untuk mengusung kadernya. Misalnya, dalam waktu dekat DPW PKS

akan melakukan polling kepada seluruh kader terbina dalam rangka melakukan jejak pendapat berkenaan dengan pencalonan Zubair Syafawi menjadi calon wagub, meski entah bergandengan dengan siapa. Jika seluruh kader terbina menyetujui, maka Zubair akan diusung oleh PKS, tapi jika tidak, maka PKS akan mengusung calon lain. ( Dokumentasi DPW Jateng, 2003).

Tetapi jika tokoh yang akan diusung dalam Pilkada di luar kader partai maka mekanismenya adalah ada pembahasan internal yang membahas hal tersebut, setingkat cabang, elemen yang membahas persoalan strategis politik adalah 50% dari DPC, 30 % dari DPP, dan 20% dari DPW. Sementara untuk tingkat wilayah, elemen yang membahas hal tersebut adalah 4 orang dari unsur Dewan Pengurus Wilayah, 2 orang dari unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, dan 2 orang dari unsur Dewan Syari'ah Wilayah.

Mekanisme yang seperti ini telah dilakukan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pilkada di daerah seperti Kota Semarang, Demak, Pekalongan, Kebumen, dan sebagainya menggunakan sistem ini dalam aplikasinya. Sisi inilah yang mungkin membedakan antara PKS dengan partai politik lainnya. Upaya untuk mewedahi berbagai “suara” yang ada merupakan budaya politik dalam tubuh PKS yang berparadigma terhadap kebersamaan dan keadilan. Keadilan yang diusung oleh visi-misi PKS secara minimal dalam *scope* yang lebih sempit terurai dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif.

Dalam mekanisme pemilihan calon legislatif, yang dilakukan oleh PKS adalah dengan merujuk peraturan DPP PKS tentang formasi calon legislatif. Formasi tersebut untuk mengakomodasi berapa persen calon legislatif yang berasal dari kader partai dan berapa persen dibuka untuk umum. Biasanya 70 persen untuk kader partai. Kader partai yang dimaksud disini adalah kader terbina dan 30 persen dibuka untuk umum yang mempunyai kesamaan visi dengan PKS, mempunyai kedekatan

dan mempunyai integritas serta moralitas yang baik menurut PKS. Kader partai yang dicalonkan oleh PKS adalah minimal kader madya, yang sudah mengalami proses kaderisasi minimal 5 tahun. Semua proses dan mekanisme tersebut ditempuh dalam rangka menciptakan pemimpin-pemimpin yang bersih, punya moralitas tinggi, berkualitas dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kader loncat dan proses politik dagang Sapi. Jadi, ada beberapa usaha yang dilakukan PKS dalam menciptakan iklim bersih. Menjunjung tinggi moralitas merupakan standar yang digunakan.

Dari sini dapat diketahui bahwa rekrutmen politik di PKS mempunyai mutan yang positif dalam kerangka distribusi dan pemberdayaan kader maupun untuk lebih bersifat netral. Rekrutmen yang ada merupakan standar yang digunakan PKS untuk mengukur keberhasilannya dalam melakukan kaderisasi. Pendek kata, evaluasi dalam tubuh PKS terlihat manakala kapasitas dan kuantitas kadernya yang menduduki jabatan politik meningkat.

#### **4.3.4. Pola Komunikasi Politik PKS**

Komunikasi antara pimpinan bagi PKS secara formal terjadi tiap satu minggu sekali. Komunikasi tersebut bisa dikatakan efektif karena dalam tradisi politik PKS, dilarang ada rangkap jabatan. Jadi pejabat-pejabat struktural di PKS hanya murni bertugas untuk partai. Dalam struktur PKS jabatan yang ada terdiri atas tiga bagian yang masing-masing mempunyai kewenangan yang saling mendukung untuk menciptakan sinergi antar pengurus,

1. MPD (Majelis Pertimbangan Daerah)
2. DPD (Dewan Pimpinan Daerah)
3. DSD (Dewan Syari'ah Syariah)

Dalam membahas hal-hal strategis, ketiga komponen tersebut melakukan rapat tertutup. MPD diwakili dua orang, DPD diwakili dua orang dan DSD diwakili satu orang. Setelah

mekanisme tersebut, baru diadakan rapat pleno yang melibatkan pengurus yang lebih banyak.

Komunikasi PKS dengan konstituen dilakukan dengan beberapa strategi. *Pertama*, Media. Bagi PKS, media mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun citra partai, membangun opini, serta menyambungkan antara PKS dengan seluruh kader dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu PKS selalu menjalin hubungan baik dengan media. Sampai saat ini, hampir tidak ada masalah yang cukup berarti antara PKS dengan media. Kerjasama yang dibangun cukup harmonis.

Pemanfaatan PKS terhadap media diantaranya berkenaan dengan pembangunan opini ketika ada regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan PKS menginginkan agar regulasi tersebut dirubah. Selain itu pemanfaatan media juga dilakukan berkenaan dengan agenda-agenda PKS baik agenda politik dan agenda internal partai, juga ketika PKS sedang melakukan proses pembelaan dan pendampingan serta pelayanan terhadap masyarakat. Ini dilakukan dalam kerangka sosialisasi terhadap masyarakat, disamping sebagai ajang pendidikan politik masyarakat.

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh; DPD PKS Kebumen kepada media adalah kegiatan *road show pers* yang dilaksanakan pada awal Juli 2006 ke sejumlah kantor media di Jawa Tengah (Koran Suara Merdeka, Jawa Pos, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Solo Pos, dan Sindo). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan dan program PKS serta meningkatkan kerjasama antara PKS dengan media massa. Dalam kegiatan ini PKS juga meminta masukan dan saran pengelola media.

Selain kegiatan tersebut DPW-DPD PKS dengan DPR RI F-PKS mengadakan *pers gathering* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2006 di Rumah Makan Sederhana

Pandanaran pada pukul 11.00-12.00 yang dihadiri 34 wartawan. Acara tersebut mendiskusikan berbagai *issue* nasional seperti Ujian Nasional, masalah pupuk dan sebagainya. Pada tanggal 10 Agustus 2006 bahumas DPW PKS melakukan pers visit ke TV Borobudur, cakra TV, dan TVB. Hal ini dilakukan PKS dalam rangka menjalin hubungan yang baik dan membangun komunikasi yang intensif antara PKS dengan media cetak maupun elektronik juga wartawan. (Humas DPW-PKS Jateng, DPD PKD Kebumen 2006).

*Kedua*, dengan melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti yang dipaparkan di atas. Strategi ini menjadi penting untuk membangun pencitraan partai sebagai partai yang bersih dan partai yang menyatu dengan masyarakat. Selain misi kemanusiaan, strategi ini juga menjadi efektif dalam menjalin hubungan antara elit partai dengan masa pendukung dan konstituen.

*Ketiga*, dengan melakukan pendidikan secara intensif kepada kader terbina. Strategi ini sangat efektif untuk mencetak kader-kader yang berkualitas, militan kepada partai dan mengetahui visi dan misi partai. Ini juga sarana untuk melakukan proses pendidikan politik kepada kader, sehingga kader mengetahui tentang tema-tema demokrasi, HAM, politik dan nilai-nilai serta ajaran syari'at Islam secara integral dan tidak terpisah.

*Keempat*, dengan melakukan pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat pendukung melalui pengajian dan dakwah yang dilakukan oleh kader dan elit PKS. Dalam pengajian dan kegiatan dakwah tersebut, PKS memasukkan materi-materi demokrasi, pemerintah bersih dan pendidikan politik (*civic education*) kepada masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas dilakukan PKS dalam satu *frame* memberikan pendidikan politik dan pembangunan budaya politik kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai wujud bahwa

PKS melakukan tindakan kongkrit dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagi PKS, aktifitas politik merupakan aktifitas yang meniscayakan keterlibatan “atas bawah”. *Pertama*, aktifitas atas yakni pemerintah dan birokrasi. Dalam arti, melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan serta melakukan advokasi kebijakan publik. Kontrol secara kritis tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Ini juga sebagai sarana pendidikan politik yang efektif bagi penyelenggara negara dan masyarakat secara umum. (Bidang Pengkaderan DPW PKS, 2006).

*Kedua*, aktifitas bawah yaitu pelayanan, pendampingan dan pendidikan. Baik kepada kader PKS maupun masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun budaya politik kerakyatan dan pendidikan politik kebangsaan yang berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman.

Kerangka peningkatan hubungan lembaga PKS sebagai partai politik di atas mengarahkan pada satu asumsi bahwa budaya politik kebersamaan terjadi di PKS. Kebutuhan PKS terhadap lembaga atau faktor pendukung terhadap politik menjadi penting adanya, Dari sini upaya yang dilakukan oleh PKS telah memberikan pemahaman bahwa hubungan tersebut merupakan strategi untuk mendekatkan partai ini dengan arus bawah.

#### **4.3.5. Pengembangan Budaya Politik**

Sebagaimana diungkapkan pada bab dua tentang visi dan misi PKS yaitu: *Pertama*, bahwa PKS adalah partai dakwah yang mempunyai basis ideologi Islam. Ideologi inilah yang ingin diperjuangkan oleh PKS dan menjadi spirit perjuangan PKS. *Kedua*, sebagai partai dakwah, maka perjuangan yang dilakukan PKS, baik perilaku dan gerak politik, pelayanan masyarakat, membangun opini, adalah ingin memperjuangkan Islam sebagai solusi atas berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Sebagai partai dakwah, maka ada proses dan mekanisme kaderisasi secara intensif yang tujuannya adalah menciptakan kader-kader dakwah

sebagai *anashir taghyir* atau agen perubahan. *Ketiga*, PKS mengidealkan masyarakat madani, sebuah bentuk negara pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ideal sebuah negara, meski PKS tetap berpegang pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai bingkai dari perjuangan sistem dan nilai Islam.

Dari visi dan misi di atas, nampaknya bisa dikatakan bahwa PKS merupakan partai yang eksklusif dan berbasis agama. Tetapi realitas di lapangan ternyata PKS bermetamorfosis dirinya menjadi partai yang lebih terbuka. Dengan adanya visi-misi PKS yang lebih condong kepada pelaksanaan konsep Islam merupakan bukti bahwa PKS merupakan partai politik yang tidak bisa dilepaskan dari Islam. Namun begitu di sisi lain adanya orang yang tidak beragama Islam dan terlibat sebagai anggota aktif juga dapat dikatakan bahwa partai ini tumbuh dengan paradigma keterbukaan. Mungkin yang perlu diperhatikan tidak lebih pada aspek sikap politik, melainkan masuk pada apresiasi terhadap kebutuhan masyarakat arus bawah.

Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah strategi yang dilakukan oleh PKS dalam kerangka menciptakan budaya politik sekaligus untuk mendapat dukungan *massa* yang lebih plural dan multi kepentingan. Konteks budaya seperti, menjunjung tinggi moralitas, keterbukaan dan sebagainya merupakan modal awal PKS untuk kemudian mengemasnya sebagai nilai yang positif. Ini bisa dilihat dari perjuangan partai yang tidak hanya menyuarakan syari'at Islam, tetapi atas dasar kepentingan bersama yang *endingnya* adalah keadilan dan kesejahteraan. Selama ini PKS lebih menitikberatkan pada perjuangan dengan tema-tema yang lebih umum seperti pemerintahan yang bersih, moralitas, pelaksanaan ajaran agama juga dituntut untuk "menghadirkan" dalam partainya nilai-nilai tersebut.

Ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat, PKS juga tidak hanya memfokuskan dirinya pada pelayanan kepada

kader PKS semata tetapi masyarakat secara umum tanpa memandang latar belakang partai atau agama. Dalam mengusung apa yang diperjuangkan oleh dirinya, PKS juga melakukan kolaborasi dengan semua kekuatan baik lintas fraksi, media, dan sebagainya. Dalam memberikan dukungan politik kepada calon kepala daerah, PKS juga melakukan dukungan di luar kader partai bahkan ada secara ideologis dan garis perjuangan partai berbeda. Dalam melakukan verifikasi terhadap calon anggota dewan, PKS tidak hanya mencalonkan kader partai seratus persen tetapi ada porsi yang dibuka untuk masyarakat secara umum meski dengan beberapa persyaratan seperti aspek moralitas, *track record*, dan kesamaan visi dan misi dengan PKS, dan hal tersebut adalah upaya membangun budaya PKS yang lebih terbuka dan bisa diminati oleh semua golongan masyarakat.

Peningkatan aksi yang dilakukan oleh PKS di atas menjadi sebuah kewajiban yang ditanamkan dalam dirinya. Makna yang kemudian dapat dipetik adalah bahwa budaya politik yang terdapat dalam diri PKS berkembang sejalan dengan perkembangan arus politik dan perkembangan masyarakat. Dan, ternyata usaha yang dilakukan PKS dalam meningkatkan hal-hal yang menjadi hasrat hidup orang banyak juga mendapat respon yang baik.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pengembangan budaya politik PKS berubah sejalan dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor yang sama yaitu pengusungan terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang mengenai perbedaan aktualisasi diri PKS dengan partai politik lainnya merupakan karakteristik tersendiri yang di kemudian hari akan memberikan makna yang tersendiri pula di hati masyarakat yang menantikan kiprahnya.

#### **4.3.6. Dinamika Faksionalisasi Partai antara Kubu Harakah dengan Kubu Hizb.**

##### **a. Dari Jamaah menuju Partai**

Pada tahun 2010, para aktifis Jamaah Tarbiyah baru akan memasuki *mihwar* mu'asasi, terjun ke politik dengan fokus pada *islahul hukumiyah* (perbaikan pemerintahan). Oleh karena itu, disebut “Visi 2010”. Namun kemudian muncullah gerakan Reformasi 1998 yang melengserkan pak Harto penguasa rezim Orde Baru selama 32 tahun. Dan, terbukalah peluang mendirikan partai politik dengan beraneka macam azas, termasuk azas Islam.

Ketika itu setidaknya ada tiga alternatif bentuk lembaga yang direkomendasikan, yaitu 1).ormas, 2).ormas yang memiliki wahana berupa partai politik, dan 3). partai politik. Pertimbangan jumlah sumber daya manusia yang terbatas membuat pilihan ormas yang memiliki sayap politik menjadi tidak *feasible* untuk dilakukan. Sementara itu, pilihan menjadi ormas saja dipandang tidak memadai untuk memanfaatkan momentum yang menyediakan peluang untuk mereformasi kondisi politik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka mendirikan partai politik menjadi pilihan yang paling rasional dan realistis. (Munandar, 2011:278).

Ada dinamika yang menarik sebelum Jamaah Tarbiyah memutuskan menjadi partai. Perdebatan di syura berlangsung sampai enam bulan dan tak menghasilkan keputusan, akhirnya menempuh mekanisme “referendum internal” yang melibatkan para kader, dengan hasil 68% menyetujui Jamaah Tarbiyah menjadi partai, dan sisanya, 32% tidak setuju. Pertimbangan mendirikan partai politik diambil dengan dua faktor, yaitu kesiapan masyarakat untuk menerima kehadiran partai Islam dan memanfaatkan momentum perubahan politik yang terjadi. Seorang

pimpinan DPP PKS mengungkapkan, “Apakah kita mempersiapkan masyarakat tapi kehilangan momentum, atau mengambil momentum sambil mempersiapkan masyarakat? Akhirnya keputusannya mendirikan partai politik”. Kendatipun begitu, setelah memutuskan mendirikan partai politik, kubu yang semula tidak sependapat pun memberikan komitmennya terhadap keputusan tersebut. Dengan keputusan mendirikan Partai Keadilan tahun 1998, berarti *mihwar Muasasi* mengalami akselerasi 12 tahun, dari rencana semula yang akan dimasuki pada tahun 2010. (Munandar, 2011:279).

Dinamika internal PKS yang dinamis terbentuk karena PKS mengadopsi khasanah pemikiran Islam yang spektrumnya sangat luas dan mengalami perkembangan yang masif selama berabad-abad. Latar belakang lahirnya Jamaah Tarbiyah/PKS sesungguhnya dimulai pada abad ke-20, yaitu ketika terjadi pembalikan arah sejarah yang ingin mengulang ekspansi dan kejayaan Islam selama sepuluh abad, dari abad ke-7 hingga abad ke-17.

Sebagian kader dan publik eksternal melihat PKS berubah, misalnya menjadi lebih pragmatis, karena mereka tidak paham bahwa PKS mengadopsi bagian-bagian yang berbeda dari keragaman khasanah Islam pada masa yang berbeda. Dalam konteks ini umat Islam di Indonesia, termasuk PKS, telah menjadi korban alur pikir dan politik linguistik Barat, antara lain dalam kategorisasi islamist, political Islam, Islamic political parties, maupun dalam tipologi ala Geertz, santri, priyayi, abangan. Dalam kategorisasi tersebut, PKS dipaksa masuk ke dalam kategori ”santri” dengan segala cirinya, seperti rural oriented, tidak moderen, tampil bersarung, dan hanya saleh secara pribadi. Implikasinya, ketika PKS tampil dengan atribut-atribut ”abangan”, seperti berjasa, menyelenggarakan

acara-acara di hotel mewah dan sebagainya, memunculkan penilaian seolah-olah PKS telah berubah dan meninggalkan jatidirinya. Contoh konkretnya yaitu: Kekagetan dan ketidaknyamanan dari sebagian kader atas penyelenggaraan Munas 2009 di Bali dan Munas 2010 di Hotel Ritz Carlton The Pacific Place Jakarta.

Konsekuensi Jamaah Tarbiyah menjadi partai, mau tidak mau membawa perubahan paradigma dakwah yang dijadikan rujukan oleh para kadernya, karena dakwah memasuki *mihwar* baru, yaitu *mihwar Muasasi*. Secara sadar bahwa perubahan tersebut sulit, karena ada rintangan yang jauh lebih kompleks *ketimbang* sebelumnya, ketika berdakwah mungkin hanya dibatasi oleh tembok-tembok masjid. Dalam konteks ini, terdapat keharusan mengubah strategi gerakan. Tuntutan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dihadapi oleh Jamaah Tarbiyah sebelum menjadi partai merupakan tantangan masa itu, sebaliknya, kebebasan dan keterbukaan pascareformasi, termasuk di dalamnya peluang-peluang para kader untuk tampil di publik, juga merupakan tantangan yang khas untuk masa sekarang.

Secara historis, Jamaah Tarbiyah memulai kiprahnya ketika rezim Orde Baru yang otoriter sedang berkuasa, yaitu negara menginfiltrasi dan mengintervensi semua partai politik, ormas, organisasi keagamaan, dan institusi sosial politik secara sempurna. Hal ini bisa dipahami jika reaksi terhadap situasi ketika itu adalah bertahan dan bersembunyi. Seorang kader menggambarkan situasi itu, “Dulu saya suka bercanda sama teman-teman, dalam manhaj kita seolah-olah ya, pada masa itu lebih sedikit kenal orang lebih baik. Kita hanya perlu berkenalan dengan orang yang direkrut, pada proses rekrutmen, serta pada

proses kaderisasi gitu”. Akan tetapi situasi otoritarianisme tersebut telah berakhir. Saat ini bahkan seorang Presiden pun tak kuasa mencegah orang berdemo dengan membawa kerbau yang diasosiasikan dengan dirinya, atau menginjak-injak fotonya. Artinya, para kader Jemaah Tarbiyah tidak bisa lagi mempertahankan citra diri sebagai objek penguasa yang otoriter. (Munandar, 2011:278).

Dengan berubahnya Jemaah Tarbiyah dari sebuah “gerakan bawah tanah” menjadi partai, sebagian besar paradigma yang valid dijadikan rujukan ketika di *mihwar tanzhimi* sudah tidak relevan lagi, atau setidaknya perlu dikaji ulang, karena perubahan fase dakwah tersebut juga menuntut peningkatan kematangan dan kedewasaan kader. Satu hal yang disoroti adalah pandangan keagamaan yang cenderung rigid dan sikap konfrontatif terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki ideologi yang berbeda. Di tahap *tanzhimi*, hal-hal tersebut relevan karena konteks waktu itu adalah membangun identitas dan militansi kader. Di masa itu istilah thagut sangat lazim digunakan sebagai label untuk pemerintah atau kekuatan-kekuatan lain yang dipandang tidak berpihak kepada Islam dan dakwah.

PKS adalah sebuah jama’ah, meskipun jama’ahnya menjadi partai tetap saja secara hakikatnya PKS adalah sebuah jama’ah (*Al hizb huwa al-jama’ah, wal jama’ah hiya al-hizb*). Menjadi jama’ah, berarti tunduk pada aturan-aturan dalam sebuah jama’ah. Definisi tersebut sebagaimana terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi apapun tindakan dan langkah PKS, tolok ukurnya bukan tindakan dan langkah partai lain, tapi Al Quran dan Sunnah. Bagi PKS kalau Al Quran dan Sunnah bukan lagi pedoman utama seperti yang mulai

terlihat saat ini, maka PKS sudah menyimpang dari *pakem* hidup jama'ah. Hal ini bisa diungkapkan pada kalimat:

*"al-hizb huwal jama'ah, al-jama'ah hiya al hizb"* memiliki arti *"partai adalah jama'ah, jama'ah adalah partai"*.

Sejarah terlahirnya kalimat yang menjadi salah satu prinsip pada tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini adalah saat di awal berdirinya partai Islam ini. Saat itu, ketika menjelang masa reformasi, terjadi perdebatan pada jama'ah tarbiyah yang sudah mulai berkembang di Indonesia. Banyak pro dan kontra yang terjadi terkait adanya rencana mendirikan partai politik saat itu, sehingga melalui banyak pertimbangan, dilakukanlah *polling* pada tubuh jama'ah ini. Dan hasil *polling* tersebut menunjukkan 80 persen anggota dalam jama'ah tarbiyah ini sepakat untuk mendirikan partai dakwah di Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan, apakah partai dakwah ini akan menjadi cabang dari tarbiyah ataukah tergabung sekaligus dengan gerakan tarbiyah?

Menurut Tifatul Sembiring yang saat itu menjadi salah satu pioner pendirian partai ini mengemukakan, melihat dari negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu mengalami masa ini, maka sebaiknya partai ini tergabung dan bersatu dalam aktivitas tarbiyah, karena jika partai menjadi cabang maka akan selalu berbenturan dengan induknya yang selalu idealis. Maka muncullah prinsip *al-hizb huwa aljama'ah, al-jama'ah hiya alhizb*, yang artinya bahwa partai adalah jama'ah, dan jama'ah adalah partai.

Dari kalimat tersebut, yang dimaksud *al-hizbu* adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedangkan yang dimaksud *al-jama'ah* adalah jama'ah dakwah, jama'ah minal muslimin. Dengan demikian arti dari *al-hizbu huwal-jama'ah* adalah PKS adalah manifestasi, representasi dan perwujudan Jamaah Dakwah. Seluruh visi dan misi, tujuan,

program, amal dan struktur jama'ah diemban oleh PKS. Misi jama'ah menjadi misi partai, kerja jama'ah menjadi kerja partai, demikian pula dengan program dan strukturnya.

Partai (hizb) dipandang sebagai sebuah manifestasi kejama'ahan. Di dalam At Tafsir al Munir : Fil Aqidati, wasy Syari'ati wal Minhaji mengartikan hizb sebagai sebuah jama'ah dengan seluruh ciri-ciri khasnya, dalam bentuknya yang solid yang bergerak dalam urusan atau orientasi tertentu. Soliditas sebuah partai ditentukan oleh faktor-faktor ideologis. Oleh karenanya wajar jika sebuah partai terdiri dari himpunan orang-orang yang lintas suku, ras, warna kulit, atau bahasa namun ideologinya satu. Adalah nyaris mustahil sebuah partai menjadi solid jika para pendukungnya terdiri dari para penganut berbagai ideologi. Sedangkan orientasi ideologi ini menjadi ciri penentu bagi sebuah kelompok manusia apakah ia akan termasuk Hizbullah ataukah Hizbusysyaithan sebagaimana kategorisasi Al Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  
الْغَالِبُونَ

*“Dan barangsiapa mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang”*

Memilih dan menegakkan Hizbullah merupakan sebuah kemestian bagi umat dalam realisasi potensi kemerdekaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Sebab, perjalanan komunitas manusia merupakan gerak maju menghadapi pilihan-pilihan dialektis yang dihadapinya, antara tatanan yang adil dan yang tidak adil, antara tatanan yang hak dan yang batil, antara tatanan yang berintikan tauhid dan yang berintikan syirik, antara tatanan

yang menyelamatkan dan yang membinasakan bagi seluruh perjalanan hidupnya. Aktivitas yang telah dilakukan para aktivis dakwah jauh sebelum Partai Keadilan dideklarasikan dipandang sebagai sebuah perwujudan kehidupan berpartai dalam arti yang paling asasi. Partai yang sesungguhnya adalah partai yang memiliki cita-cita memperjuangkan kalimah Allah SWT di muka bumi ini dan menebarkan rahmat-Nya untuk umat manusia.

PKS adalah *Wajihah* dari Jama'ah Dakwah, maka *Wajihah* bisa berganti sebagaimana telah bergantinya nama partai dari PK menjadi PKS. *Wajihah* adalah *mutaghoyyirat* dan *Jama'ah* adalah *tsawabit*. Jama'ah akan terus hidup, bekerja dan berjuang mencapai tujuan-tujuannya walau harus berganti *Wajihah*. *Wajihah* bisa bermacam-macam. Bisa pula jama'ah merepresentasikan dirinya secara terbuka bila dimungkinkan oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. *Wajihah* Hizb adalah ijthad dari para kader Jama'ah dakwah sebagai wadah paling tepat untuk merepresentasikan jama'ah dari berbagai pilihan *Wajihah* yang ada.

Jargon PKS yakni “partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai” mencoba menghilangkan dikotomi antara politik dan dakwah yang selama ini terkesan begitu kuat. Dikotomi ini telah mendudukkan dakwah di sudut-sudut masjid yang bersih dan suci, sementara politik yang kotor dilepaskan di pasar-pasar, di jalan-jalan, di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Sehingga tak heran kalau kondisi negara kita menjadi carut-marut seperti ini.

Dan, kini PKS dengan jargon “partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai”, mencoba mengikat kembali kuda binal politik ini dengan tali kekang dakwah dan moral yang kuat. Sehingga yang akan muncul di pasar-pasar, di jalan-jalan, di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan,

tidak lagi para pedagang, politikus dan pegawai yang curang dan korup, melainkan mereka yang bermoral, santun, bersih dan memikirkan kepentingan rakyat.

Perubahan dari jama'ah menuju partai merupakan sebuah transformasi organisasi, yang pada awalnya hanya berurusan dengan masalah dakwah beserta keagamaan kemudian setelah menjadi partai banyak permasalahan dan bidang yang ditangani, khususnya politik. Oleh karena itu perubahan tersebut menimbulkan celah perbedaan, walaupun pembentukan partai juga telah disetujui, namun tarik ulur kepentingan pasti terjadi.

#### **b. Antara Kubu Harakah dengan Kubu Hizb**

Munculnya Kubu Harakah dan Kubu Hizb merupakan benturan antara kader PKS yang masih memegang teguh ideologinya sebagai jemaat sebagaimana gerakan tarbiyah yang dilakukan dengan pihak yang membawa atribut partai sesuai dengan kebutuhan yang cenderung pragmatis. Ideologis dan pragmatis yang saling berbenturan ini merupakan buah dari basic PKS sebagai partai kader yang termasuk kategori partai elit, yang seharusnya memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Partai jenis ini tidak bertujuan untuk mendapatkan anggota sebanyak mungkin, tetapi lebih menekankan pada upaya memperoleh dukungan dari orang-orang terkemuka, lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Namun PKS berusaha untuk meraih masa yang banyak. Hal ini merupakan kontradiksi dari segi tipologi partainya.

PKS dengan tegas membangun partai dari kader-kader yang militan, namun ingin meraih massa yang banyak. Hal ini merupakan komitmen partai yang kurang terhadap *basic*-nya atau berubah haluan dari partai kader menjadi partai berbasis massa. Dimana seharusnya partai kader membangun kader yang kuat, loyal, militan, dan setia

dalam memperjuangkan partainya, sehingga partai benar-benar memperhatikan kualitas dari anggotanya, bukan hanya massa dalam jumlah banyak yang belum tentu loyal terhadap partai.

Kaderisasi sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh satuan tugas khusus, yang bekerja memungkinkan lahirnya suatu organisasi. Aktifitas prosesnya tidak hanya dalam pendidikan formal dalam kelas, tetapi lebih sistematis yang menyatukan pikiran dan tindakan. Seorang kader memiliki tugas antara lain: pertama, merumuskan dengan tegas melalui penyelidikan akurat siapa yang mendukung perubahan dan yang menolak perubahan. Kedua, tanpa ragu turun ke rakyat dan melakukan integrasi sepenuhnya tinggal bersama rakyat. Ketiga, tangkas dalam merumuskan penderitaan rakyat dalam tuntutan politik. Dan keempat, menjaga sikap di tengah rakyat (sifat-sifat dasar) di bawah prinsip memenangkan hati rakyat untuk kemudian memenangkan pikiran. (Mahardika, 2000: 248)

Perubahan jamaah menjadi partai yang pada awal pembentukannya sudah menimbulkan tarik ulur kepentingan, perbedaan pendapat, dan perdebatan antara yang setuju menjadi partai dengan yang setia terhadap jamaah, merupakan celah awal perpecahan di PKS, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lain hingga munculnya perbedaan Kubu Harakah dengan Kubu Hizb, dimana salah satu kubu tetap setia terhadap ideologi PKS sebagaimana masa awal pembentukan jama'ah, disisi lain terdapat kubu yang lebih cenderung pragmatis dengan merubah pola, sistem, dan arah strategi politik PKS, perubahan yang dilakukan mengingat bahwa pola, sistem, dan arah strategi politik PKS yang mengedepankan ideologi tersebut dianggap tidak efektif.

Bersama Tizar Zain, Syamsul Balda, eks Wakil Presiden PK, membentuk Forum Kader Peduli (FKP).

Balda yang dinilai PKS melakukan pelanggaran moral terlihat emosional ketika menyebut PKS sekarang bergaya mafia. Abu Ridho juga turun gunung membela Yusuf yang menurutnya diperlakukan tidak etis oleh “penguasa” PKS. Meruncingnya aroma persaingan di internal PKS merupakan buah dari kontestasi yang tidak sehat antara kubu idealis-ideologis dan kubu pragmatis-realistis. Dinamika semacam ini lumrah terjadi di banyak partai.

Perbedaan terutama terletak pada strategi pengembangan PKS, bukan substansial. Kubu ideologis banyak didukung oleh basis sosial harakah, sedang kubu realistik datang dari figur-figur muda seperti Anis Matta dan Mahfudz Shidiq yang di-back up Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin.. Ketika dideklarasikan sebagai partai, struktur harakah dikawinkan dengan partai sehingga muncul adagium “al-harakah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-harakah”

Oleh karena *mindset*, geneologi, dan pengalaman historisnya berbeda, orientasi harakah yang idealis-ideologis dan konservatif sering berbeda dengan kubu hizb yang lebih pragmatis-realistis. Kubu hizb lebih lihai dalam membesarkan partai dan memahami definisi politik sebagai *who gets what, when, and how*. Sebaliknya, kubu harakah kurang fleksibel dalam melakukan kompromi dan negosiasi. Awalnya kubu harakah dominan di awal berdirinya PK. Kubu hizb mendapat momentum ketika PK hanya mendulang suara 1,4 juta pada Pemilu 1999. Kubu harakah dianggap terlalu hitam putih dalam mengelola partai. Ketika berubah menjadi PKS, dicobalah strategi pencitraan yang lebih mengedepankan isu-isu universal.

Kekuatan Yusuf Supendi ada dua. *Pertama*, isu yang diusung Yusuf telah menusuk jantung kredibilitas PKS: isu poligami dan korupsi. Poligami, meski diperbolehkan

dalam Islam, bisa memengaruhi dukungan dari pemilih perempuan terhadap PKS. Isu kedua adalah tuduhan korupsi terhadap petinggi PKS. Bila terbukti, kredibilitas PKS sebagai partai bersih menjadi terlucuti. *Kedua*, kekuatan Yusuf datang dari figurnya sendiri. Selain menjadi salah satu pendiri PK, dia juga pernah menduduki jabatan strategis di partai maupun fraksi. Yusuf juga berperan besar dalam membentuk kantung-kantung harakah.

Selain itu, tuduhan Yusuf yang dialamatkan ke elite-elite PKS juga mencoreng citra PKS yang selama ini dikenal sebagai partai disiplin dan pintar menjaga *image* sebagai partai yang solid. Memang tak menutup kemungkinan Yusuf menjadi “Kuda Troya” bagi kepentingan pihak tertentu untuk menggembosi PKS. Bagaikan kotak pandora, laporan Yusuf ke BK DPR dan KPK memicu elite-elite PKS kecewa dengan partai. Seperti Yusuf, elite-elite yang membuka mulut itu ada yang dipecat atau dipinggirkan dari PKS.

Pilihan taktik elektoral ini terbukti berhasil. Pemilu 2004, PKS meraih 8,33 juta atau 7,3%. Kubu hizb makin percaya bahwa isu-isu inklusif yang mampu membesarkan PKS. Saking bersemangatnya, kubu hizb menjual Soeharto sebagai guru bangsa pada Pemilu 2009. Jelas taktik ini mengecewakan kubu harakah karena banyak kader PKS yang jadi korban Soeharto. Kubu hizb juga menegaskan PKS sebagai partai terbuka dan plural dalam munas terakhir. Isu keterbukaan ini memantik resistensi dari kader harakah karena dianggap makin menjauhkan PKS dari khitahnya.

Perilaku politik PKS yang awalnya didominasi faksi harakah menunjukkan kecenderungan PKS untuk mengakomodasi basis ideologis *massa* partai yang

konservatif. Suara PK yang minim pada Pemilu 1999 mengubah orientasi PKS menjadi lebih berkiblat pada logika kompetisi. PKS lebih mengikuti selera pasar pemilih. Segmentasi pemilih kita seperti mengikuti kurva normal dalam statistik. Artinya, proporsi terbesar pemilih Indonesia berdiam di “tengah.” Pemilih yang berdiam di ekstrem kiri atau kanan, secara statistik, sangat kecil. Pilihan PKS untuk menjadi partai terbuka, termasuk bagi kalangan nonmuslim, merupakan pengejawantahan politik tawasuth (tengah).

Namun, tantangan terberat menjadikan PKS sebagai partai tengah justru datang dari internal mereka, terutama kubu harakah dan basis massa tradisional PKS yang ortodoks. Tuduhan Yusuf yang membabi buta terhadap elite-elite PKS merupakan refleksi dari kekecewaan terhadap orientasi partai yang makin terbuka. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi yang lebih intens terhadap kubu harakah dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting di partai. Bagaimanapun mereka bagian penting dari PKS dan terbukti menjadi tulang punggung partai. Jika PKS tak mendapatkan sokongan basis harakah mereka, PKS akan sulit mempertahankan ceruk pemilih tradisional, sementara pemilih baru belum tentu didapat.

Saat ini, di dalam tubuh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terdapat dua kubu besar yang berbeda pandangan tentang cara membesarkan partai. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Burhanuddin Muhtadi, yang menyatakan bahwa ketika dideklarasikan sebagai partai, struktur harakah (gerakan) dikawinkan dengan partai, sehingga muncul adagium “*al-harakah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-harakah*”). Karena mindset, genealogi, dan pengalaman historisnya berbeda, maka orientasi harakah yang idealisideologis dan konservatif sering berbeda dengan kubu hizb yang lebih pragmatis-realistis, tapi sangat rasional dan fleksibel. (Muhtadi, 2012:220).

Kubu hizb lebih lihai dalam membesarkan partai dan memahami definisi politik sebagai arena perebutan kekuasaan. Sebaliknya, kubu harakah kurang fleksibel dalam melakukan kompromi dan negosiasi. Pada awalnya, kubu harakah dominan di PK. Kubu hizb mendapatkan momentum ketika PK hanya mendulang suara 1.4 juta pada Pemilu 1999. Kubu harakah dianggap terlalu hitam-putih dalam mengelola partai sehingga kurang berhasil.

Ketika masih bernama PK (Partai Keadilan), nuansa ideologis sangat kental terasa di tubuh partai. Hal ini karena PK didominasi oleh kubu harakah. Dalam manifesto pendirian PK, ada seruan untuk merestorasi kekhalifahan Islam. PK menggariskan medan dakwah khilafah, yakni setelah pemerintahan Islam (negara Islam) di Indonesia terbentuk diharapkan partai-partai Islamis yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di negara-negara lain juga berhasil membentuk sistem pemerintahan Islam.

Kemudian, mereka membentuk lembaga multilateral yang beranggotakan negara-negara Islam yang bersepakat membentuk pemerintahan Islam sedunia atau khilafah Islamiyah. Dalam Musyawarah Nasional PK tahun 2000, sempat tercetus gagasan kekhalifahan Islam sebagai cita-cita jangka panjang PK, pada saat membahas panduan kebijakan dasar partai, yang dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

“(Kami) menyadari bahwa tujuan dakwah yang akan dilakukan adalah tujuan yang sangat besar, yaitu menerapkan agama Allah di bumi dan mengukuhkan kedaulatan atau negara Islam dalam sebuah sistem kekhalifah-an Islam, yang hasilnya dapat dirasakan oleh generasi-generasi berikut. Oleh karena itu, setiap kebijakan (...) dan program (...) berkaitan dengan tiga dimensi waktu.

Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan”. (Muhtadi, 2012:195).

Jika diperhatikan, pandangan PK (Partai Keadilan) di Indonesia tentang negara Islam dan khilafah memiliki kesamaan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, tahun 1928-1949. Keduanya sama-sama menganggap penting eksistensi *daulah* Islam dan khilafah Islamiyah. Maka dari itu, mereka sama-sama memperjuangkan tegaknya kembali sebuah negara Islam dan menyatukan seluruh kaum Muslimin di dunia dalam sebuah kekhalifahan Islam. Tetapi, pandangan partai ini terhadap negara Islam dan khilafah berubah seiring dengan berubahnya nama PK (Partai Keadilan) menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Sebagaimana diketahui bahwa PKS didominasi oleh kubu hizb, yang lebih pragmatis. Setelah bertransformasi menjadi PKS, ajakan untuk mengembalikan ke-khalifah-an Islam tidak lagi termaktub dalam cita-cita politik dan platform partai. Ini sesuai dengan perubahan strategi PKS di Indonesia, yang ingin meluaskan ceruk pasar pemilih dengan memprioritaskan agenda-agenda yang bisa diterima publik secara luas. Namun demikian, gagasan khilafah Islam masih tertanam kuat dalam pemikiran kader dan elite PKS di Indonesia. (Muhtadi, 2012:195.)

Gagasan negara Islam dan khilafah, dalam pandangan PKS di Indonesia yang muncul saat ini ke permukaan, sangat berbeda dengan gagasan sebelumnya ketika masih bernama PK (Partai Keadilan). PKS di Indonesia telah mengubah pemikiran sebelumnya, dari memperjuangkan tegaknya syariat Islam sebagai dasar negara, atau memperjuangkan tegaknya negara Islam, menjadi memperjuangkan tegaknya nilai-nilai universal Islam di dalam negara.

Menurut Hidayat Nurwahid, sebagai salah seorang tokoh penting PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, kata-kata “negara Islam” bukan sesuatu hal yang diutamakan. Pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (Salallahu ‘Alaihi Wassalam), atau Khulafa al-Rasyidun, Khulafa Umayyah, dan Abbasiyah juga tidak menyebutkan “negara Islam”. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya untuk tidak melakukan kezaliman pada apapun dan siapapun, serta tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan yang tidak berujung pangkal. (Furkon, 2004: 234)

Hidayat Nurwahid juga mengemukakan bahwa dalam kehidupan, baik wilayah agama maupun negara, harus dilandasi oleh moral agama dan dilakukan secara konsisten yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Dalam pandangan Hidayat Nurwahid, dalam konteks Indonesia, syariat Islam sudah terlalu sering disalahpahami. Maka yang paling diutamakan dari syariat Islam sekarang ini adalah bagaimana tampil menjadi solusi yang indah, dinikmati, sesuatu yang bisa dilaksanakan, dan itu coba dilakukan secara riil politik. Lebih dari itu, dalam pelaksanaan syariat Islam harus membawa kepada keyakinan publik bahwa syariat Islam tidak menjadi faktor diskriminasi dan desintegrasi, tapi menjadi faktor yang membawa kerahmatan, faktor solusi dari syariat Islam itu sendiri. (Furkon, 2004: 236).

Selain Hidayat Nurwahid, Anis Matta sebagai salah satu elite PKS di Indonesia juga memiliki pendapat yang serupa. Anis Matta, antara lain, mengemukakan bahwa: (... ) tidaklah penting menangkap wacana negara Islam atau bukan negara Islam, karena negara ini milik umat Islam. Sejak awal, kita mengidentifikasi diri kalau kita bukan orang luar di negeri ini, tapi bagian dari negeri ini. Dulu,

orang mengelola negara ini dengan cara sekular, sekarang kita ingin mengelola negara ini dengan cara Islam, itu intinya. Yang perlu kita bangun adalah bagaimana menghadirkan Islam pada seluruh sektor kehidupan. Kita sekarang ini membangun suatu pandangan fiqih bernegara yang jauh lebih luas, tidak berorientasi tekstual. Kita menempuh cara-cara politik seperti ini dengan semangat yang lebih substansial. Misalnya, bagaimana mengelola sistem pendidikan Islam dengan cara Islam, bagaimana mengelola sistem pertahanan kita secara Islami, itu yang penting. Dan, tidak semuanya itu menyangkut wacana dan pemikiran, justru sebagian besar di tingkat aplikasi. (Furkon,2004:236).

Jadi, jauh sebelum kita menggunakan nama syariat Islam, Republik Islam, dan seterusnya, buktikan saja dulu di tingkat kenyataan, kita memang kapabel, bahwa orang enjoy kalau kita berkuasa. Ini jauh lebih penting daripada ketika kita menggunakan nama “Islam”, kemudian negara ini bangkrut di tangan kita. Kalau kita diserang Amerika dan tidak bisa melawan, atau dikerjai George Soros dan kita diam, itu tidak ada gunanya. Dengan kata lain, dari sudut kelembagaan, mau disebut “negara Islam” atau “komunitas Islam yang bernegara”, intinya bukan wadahnya, tapi amaliah-nya dan arah visi dan misinya.

Demikian halnya dengan pandangan tentang khilafah Islamiyah. Dalam pandangan elite PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, khilafah adalah konsep tentang satu kekuasaan yang menyatu bagi seluruh wilayah-wilayah Islam dalam suatu kekuasaan yang tertinggi dalam suatu kendali. Tetapi, bagaimana pengendalian itu dilakukan secara bersama-sama, itu terpulang kepada formatnya yang disesuaikan dengan situasi-situasi pada zaman setiap generasi. (Furkon, 2004:248).

Hidayat Nurwahid juga memandang bahwa ke-khalifah-an adalah sebuah aktivitas politik, dimana nilai-nilai Islam hadir dan peran dari politik Islam memberdayakan umat itu berhasil, dimana yang munkar bisa diminimalisasi dan yang ma'ruf bisa dimaksimalisasi. Pada zaman ini, tanya Hidayat Nurwahid, apakah ke-khalifah-an harus berwujud dengan nama khilafah, bukankah negara “republik” atau “kerajaan”, misalnya, dalam skala tertentu bisa disebut khilafah?.

Menurut Hidayat Nurwahid, apapun namanya, republik atau kerajaan, kalau disitu terlaksana dengan baik nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, ke-Islam-an, pemberdayaan, tidak terjadi praktek-praktek korupsi, penindasan, kezaliman, nepotisme, tirani, dan kemudian terjadi pergantian kepemimpinan yang Islami, maka ianya bisa disebut sebagai ke-khalifah-an itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, yang sudah berbentuk “republik”, tidak perlu lagi diubah namanya menjadi kekhilafah-an Islam.(Furkon, 2004: 249-250)

Ahmad Dzakirin, salah seorang kader PKS di Indonesia, juga mengemukakan hal yang senada dengan Hidayat Nurwahid. Menurutnya, kepemimpinan dalam perspektif khilafah lebih merefleksikan pemahaman terhadap nilai dan prinsip kepemimpinan yang benar menurut Islam, ketimbang sebagai sebuah eksistensi maupun bentuk pemerintahan. Khilafah lebih merupakan substansi nilai yang bersifat tetap, ketimbang perincian-perincian institusional yang bersifat dinamis. (Dzakirin,2011)

PKS di Indonesia lebih melihat fungsi dari ke-khalifah-an itu sendiri. Jika sebuah negeri mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dan berwibawa untuk membantu dan melindungi negeri Muslim lainnya, maka negara tersebut sudah memerankan dirinya sebagai kekhilafahan, meskipun bentuk dan namanya “republik”

atau “kerajaan”. Alasannya, bentuk sosio-kultural dan geopolitik pada zaman modern ini sudah berbeda dengan masa lalu. Lebih jauh lagi, bagi PKS di Indonesia, konsep khalifah-an perlu direkonstruksi dengan mempertimbangkan perubahan tatanan dunia yang sangat dinamis ini. (Furkon,2004: 253). Tetapi di sisi lain, pandangan-pandangan kader PKS tersebut dikritik oleh ideolog PK (Partai Keadilan), yaitu Abu Ridho.

Abu Ridho menyebutkan bahwa ada sebagian koleganya yang terjerat oleh virus pragmatisme.(Muhtadi, 2012:195). Akhirnya, partai menjadi menyimpang dari tujuan awal didirikannya. Abu Ridho, mengungkapkan apabila ada aktifitas dakwah (da’i) yang menyatakan bahwa partai dakwah ini tidak akan memperjuangkan syari’at Islam, dengan alasan apapun (politis maupun diplomatis), jelas telah menyimpang dan menyeleweng dari sasaran gerakan dakwah yang utama. Mestinya, mereka justru menyebarkan opini tentang kewajiban menegakkan syari’ah bagi setiap Muslim, secara massif, bukan malah menyembunyikannya. Apalagi di era Reformasi, yang setiap orang bebas bicara apa saja, karena dilindungi oleh Undang-Undang.

Kemudian, apabila partai dakwah berkoalisi dengan partai, organisasi, atau komunitas lain yang berbasis ideologi asing, juga telah menyimpang. Karena tugas gerakan dakwah Islam adalah membebaskan umat dari penjajahan atau dominasi asing, baik itu ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial. Bukan malah bekerjasama dalam ketidakjelasan maksud dan tujuan. Para kader dakwah atau da’i yang terpengaruh kemudian menganut faham materialisme dan gaya hidup konsumerisme juga telah menyimpang dan menyeleweng dari sasaran gerakan dakwah ini.

Mereka seharusnya memberi contoh berupa keteladanan hidup yang diajarkan Rasulullah SAW (Shalallahu ‘Alaihi Wasallam), sederhana, dan santun

dalam keinginan dan kebutuhan. Kesalahan dan dosa mereka hanya bisa ditebus dengan menyosialisasi kewajiban menegakkan syari'at kepada seluruh elemen umat, dan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh; serta menghindari diri dari sikap dan perilaku materialistis dan konsumtif.

Akhirnya, jika Ikhwanul Muslimin di Mesir memiliki pandangan bahwa menerapkan Islam dalam negara, dengan membentuk sebuah negara Islam dan mempersatukan dunia Islam dengan menegakkan khilafah Islamiyah, adalah sebuah kewajiban yang tak bisa ditunda, maka PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia lebih memandang perlunya mengamalkan nilai-nilai universal Islam dan fungsi-fungsi ke-khilafah-an dalam sebuah negara, tanpa harus menjadi negara Islam dan khilafah Islamiyah dalam wujud yang sebenarnya. Meskipun demikian, di dalam tubuh PKS di Indonesia masih terdapat juga kader-kader partai, terutama kader-kader senior yang berada dalam kubu harakah, yang tetap meyakini perlunya eksistensi sebuah negara Islam dan khilafah Islamiyah, seperti yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna dari Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Dilema yang terjadi di PKS, tarik menarik dan faksionalisasi partai antara kubu harakah dengan kubu hizb merupakan dilematika antara kubu ideologis dan pragmatis. Satu sisi kubu harakah mengharapkan kader PKS tetap solid terhadap ideologi partainya, tidak “menghalalkan” segala cara dalam menjalankan politik, ataupun lupa dengan jati diri setelah mendapat jabatan politik. Sedangkan disisi lain kubu hizb dengan pragmatis merubah pola, sistem, dan arah strategi politik PKS, perubahan yang dilakukan mengingat bahwa pola, sistem, dan arah strategi

politik PKS yang mengedepankan ideologi tersebut dianggap tidak efektif.

Dilematika dan tarik menarik dan faksionalisasi partai yang terjadi antara kubu harakah dengan kubu hizb merupakan perkembangan dari perdebatan panjang tentang jati diri PKS antara jamaah dengan partai, antara kesempurnaan dengan kesempatan. Sebagaimana dalam perdebatan pro dan kontra dari Jama'ah menuju Partai tersebut terdapat pandangan perbedaan antara kesempurnaan dengan kemunduran. Di satu sisi pihak menganggap perubahan jama'ah menjadi partai adalah kesempurnaan dakwah, sehingga dakwah bisa diperluas secara umum melalui kendaraan politik. Di sisi lain terdapat pihak yang menganggap hal tersebut hanya sebuah kemunduran sebagai jama'ah, karena sudah tidak murni lagi jika harus menjadi partai, karena tidak lagi fokus terhadap urusan dakwah dan ummat.

Dalam konteks PKS di Kebumen, tarik menarik dan faksionalisasi, bahwa kubu Harakah adalah yang mengawali berdirinya PK 1998 yaitu Ustadz Abdul Choliq selaku ketua PK 1998. Drs. Rahadi (Sekretaris), Drs. Mundzir Hasan (bendahara). Namun demikian dalam perkembangannya pada 2002 Ustadz Abdul Choliq kembali ke khittah dakwah pendidikan dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu at-Thoriq Gombang. Adapun Drs. Mundzir Hasan mendirikan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) al-Amin di Gombang dan menjadi direktornya.

Kubu Harakah direpresentasikan oleh kekuatan faksional "kulon kali Lukulo" Karanganyar, Gombang, Sempor, Buayan, Rowokele.

Sedangkan Drs. Rahadi terus terjun dalam kubu hizb hingga duduk sebagai wakil rakyat DPRD Kebumen 2009-2014, bersama Suratno (Dapil Sadang, Alian, Pejagoan)

Kubu Hizb tercermin dari kekuatan faksionalisasi “wetan kali Lukulo” (Kebumen, Pejagoan, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, dan Prembun).

#### **4.4. Kasus Impor Daging Sapi**

Pada 30 Januari 2013, Luthfi Hasan Ishaq presiden PKS sekaligus anggota DPR-RI ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menterinya, Suswono dari kader PKS. (*Tempo*, 1 Februari 2013)

Kasus ini turut menyeret Ahmad Fathonah, seorang teman dekat Luthfi yang awalnya diduga juga seorang kader PKS, tetapi kemudian segera dibantah oleh Anis Matta, selaku sekretaris jenderal yang kemudian naik ke posisi presiden partai. Bantahan ini diulangi lagi oleh Fathonah sendiri di hadapan pengadilan.). Luthfi menjadi politikus PKS pertama yang menjadi tersangka KPK. Kasus impor daging sapi tersebut cukup membuat PKS terpuruk karena menjadi sorotan buruk bagi masyarakat, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan penurunan jumlah suara PKS pada Pemilu 2014 dibanding 2009. (*Tempo*, 13 Mei 2013).

#### **4.5. Isu Radikalisme**

Terkait isu-isu Transnasional Islamis PKS di Kebumen sebagaimana tuduhan Wahabi, Gerakan Islam Garis Keras (Radikal), dan Ilusi Negara Islam berikut ini temuan-temuan yang sedikit banyak bisa menjelaskan dan menegaskan terhadap keberadaan PKS.

##### **4.5.1. Tuduhan Wahabi**

Tuduhan Wahabi merupakan salah satu isu Transnasional Islamis yang dituduhkan pada PKS yang memberikan dampak negatif terhadap PKS Kebumen, khususnya sentimen yang timbul terhadap para Kader PKS. Sebagaimana dungkapkan oleh Haryoko:

“Isu miring tentang PKS yang paling berdampak di Kebumen itu Wahabisme, ya para kader dianggap

mengikuti faham wahabi itu, hingga para kader dibenci oleh masyarakat Kebumen yang rata-rata orang NU”. Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

Sentimen terhadap Kader PKS maupun terhadap calon-calon yang diusung oleh PKS baik di legislatif maupun eksekutif menjadi batu sandungan bagi PKS. Hal tersebut disebabkan oleh langkah PKS yang terganggu dalam menjalankan program dan kegiatannya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal bergaul dengan masyarakat.

“Kalau sudah benci, sensi, dan tidak suka sama kader PKS ya otomatis program dan kegiatan PKS jadi tersandung, gimana tidak tersandung jika jalani program dan kegiatan harusnya bersama masyarakat, sedangkan kami dibenci?” Ungkap Fatah Banani.

(Wawancara dengan Fatah Banani Ketua DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015).

Sebagian besar masyarakat Kebumen agak terpengaruh dengan isu tersebut, hal ini disebabkan oleh gencarnya isu tersebut dibicarakan oleh masyarakat, dan terlebih masyarakat Kebumen yang beragama Islam mayoritas adalah kalangan warga Nahdliyin yang sangat bersebrangan dengan faham Wahabi tersebut. Sebagaimana Fatah Banani menyebutkan; (Wawancara dengan Fatah Banani Ketua Umum DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015.)

“Isu Wahabi itu sebenarnya sudah lama dan tidak terlalu berdampak, tapi akhirnya muncul lagi berawal dari media kemudian mencuat di masyarakat Kebumen, dan warga sini kebanyakan orang NU, ya sudahlah, apalagi zaman sekarang media sangat banyak dan seakan sudah menyatu dengan masyarakat, lagian masyarakat banyak yang menelan mentah-mentah isu yang diangkat media.”

Menurut Fatah Banani isu Wahabi tersebut sengaja dimunculkan untuk menjatuhkan PKS di depan publik, dan untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PKS.

“Saya kira sudah jelas, semua orang bebas memiliki faham apapun, dan sangat jelas PKS tidak menciptakan madzhab, bahkan begaul dengan membantu masyarakat, ini gak *fair!* Hanya untuk menang Pemilu membawa isu SARA, walaupun ada sebagian kecil kader yang mungkin terpengaruhi oleh Wahabi itu sah saja, karena agama itu bebas, tapi bukan berarti semua orang PKS”

PKS secara umum, baik PKS Pusat maupun PKS Kebumen menolak isu aliran wahabi tersebut. Jika dilihat lebih lanjut sistem pengkaderan PKS melalui tarbiyah hanya sebatas mendalami Islam dan tidak mendalami suatu aliran tertentu atau sampai menciptakan sebuah aliran yang harus dan wajib dianut oleh kader PKS. Sistem pengkaderan PKS juga tidak sampai menjadikan kader sebagai da'i ataupun penceramah sebagaimana yang dijalani oleh Wahabi dengan menciptakan da'i-da'i yang bertugas menyebarkan aliran tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Haryoko sebagai berikut:

“Tuduhan Wahabi itu ngawur sekali. Jika mau memahami PKS, apalagi para kadernya, lihatlah sistem pengkaderan yang ada, kader kami tidak mempelajari aliran-aliran Islam, apalagi mewajibkan mengikuti aliran tertentu seperti Wahabi. Bahkan sistem kader tidak menghasilkan da'i seperti Wahabi yang menyebarkan alirannya” (Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

PKS Kebumen melakukan berbagai cara untuk melawan isu Wahabi tersebut. Di antaranya dengan mengadakan seminar, pengajian, dan selebaran tentang bagaimana sesungguhnya PKS beraskan Islam. Lebih lanjut PKS berusaha memberikan bukti nyata perjuangan PKS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan bukti nyata tersebut dapat membuka hati masyarakat sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang

banyak dihujat namun berusaha mewujudkan kesejahteraan ummatnya.

Haryoko mengungkapkan; “Kami berusaha melawan isu tersebut, melalui seminar, pengajian, dan selebaran tentang bagaimana sesungguhnya PKS berazaskan Islam dan tidak ada embel-embel aliran apalagi Wahabi. Dan kami tunjukkan i’tikad kami, niat kami, dan bukti kami dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program itu. Kami mencontoh Rasulullah SAW, walau dihujat namun beliau menunjukkan hujatan itu tidak benar dengan bukti-bukti perjuangan beliau. (Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

#### **4.5.2. Gerakan Islam Radikal**

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham / aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Isu gerakan Islam garis keras (Radikal) yang ditunjukkan kepada PKS merupakan isu yang menjurus pada sistem kaderisasi PKS yakni tarbiyah. Gerakan Islam radikal merupakan salah satu isu yang menyerang PKS, bahwa seolah-olah semua kader PKS itu radikal”. PKS Kebumen merupakan salah satu sasaran empuk isu tersebut di samping PKS daerah lain, sehingga timbul kebencian terhadap para kader PKS juga pada dakwah dan tarbiyah yang dilakukan PKS.

Sebagaimana Fatah Banani mengungkapkan; “Ada pepatah Jawa bahwa anak polah bapak kepradah, anak yang tingkah orangtua juga harus menanggungnya. Ya pepatah itu nampaknya benar-benar menancap di hati orang Jawa, sehingga satu kader melakukan kesalahan maka semua kader PKS harus menanggungnya. Dan, parahnya semua kader PKS dianggap sama.”(Wawancara dengan Fatah Banani Ketua Umum DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015).

Infiltrasi isu politik yang dibawa ke dalam majelis taklim (masjid) dipercaya dilakukan oleh semua kader PKS, tanpa melihat bukti atau kenyataan dari kader-kader yang lain. Keberhasilan isu tersebut dalam menjatuhkan PKS juga efek bola salju dari kader PKS yang sedang bermasalah sebagaimana Luthfi Hasan Ishaq mantan Presiden PKS yang terlibat dalam kasus impor daging sapi. Sehingga isu-isu lain yang muncul akan lebih mudah dipercaya karena pada akhirnya kader PKS terbukti salah dalam tindakannya.

“Kasus impor daging sapi itulah yang termasuk mendukung isu-isu lain yang sebelumnya menyerang PKS, ya kebanyakan orang yang sudah dibenci dan dianggap buruk, apalagi akhirnya terbukti ada kesalahan maka dianggap selalu salah. Dan, kasus impor daging sapi itu seakan menjadi alasan dan logika pembenar atas isu-isu buruk yang menyerang PKS sebelumnya”, ungkap Fatah Banani.

#### **4.5.3. Ilusi Negara Islam**

Isu atas Ilusi Negara Islam tersebut tidak berdampak pada kader PKS dan masyarakat Kebumen, dikarenakan isu tersebut muncul dari sebuah buku yang tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hanya beberapa kalangan terpelajar di wilayah Kebumen yang terpengaruh isu tersebut.

“Ilusi negara Islam itu kan dari buku, makanya tidak berpengaruh di Kebumen, apalagi masyarakat secara luas tidak mengkonsumsi buku itu, walau ada juga kalangan terpelajar yang terpengaruh, karena orang terpelajar kan membaca buku, sementara masyarakat umum yang kebanyakan petani, ada juga pedagang tidak ngurusi buku” ungkap Fatah Banani. (Wawancara dengan Fatah Banani Ketua Umum DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015).

Selain kultur masyarakat umum yang notabene petani dan pedagang, buku tentang Ilusi negara Islam tersebut memang tidak menarik perhatian masyarakat, lebih lanjut masyarakat sudah mulai tidak peduli dengan PKS yang sudah hadir dengan isu-isu negatif sebelumnya.

Haryoko mengungkapkan;

“Masyarakat di Kebumen tidak mau tau, tidak tertarik lagi dengan isu-isu di PKS, apalagi hanya isu dari buku, terlebih PKS sudah dicap miring oleh masyarakat, jadi tidak ada lagi yang menarik dari PKS dalam pandangan masyarakat, jadi mereka tidak peduli”(Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

Isu-isu transnasional Islam yang ditujukan pada PKS pada akhirnya tidak menarik perhatian masyarakat, hal tersebut dikarenakan isu-isu miring yang simpang siur sudah sering terdengar.